

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Hakim, Lukman, Ika Dewi Sartika Saimima, and Anggreany Haryani Putri. *Penerapan Konsep “Plea Bargaining” dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan Manfaatnya bagi Sistem Peradilan pidana di Indonesia*. Sleman: Penerbit Deepublish. 2020.
- Sriwidodo, Joko. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press, 2020.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Fuady, Munir dan Sylvia Laura L. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Nazir, Moh. *Metodologi Penelitian dan Yurimetri*. Semarang: Ghalia Indonesia. 1990.
- Nurdin, Nurliah dan Astika Ummy Athahira. *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*. Bandung: CV. Sketsa Media, 2022.
- Rahayu. *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2010.
- Rasjidi, Lili, and Ira Thania Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2007.
- S., Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian dan Yurimetri*. Semarang: Ghalia Indonesia. 1990.
- Suteki and Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum : (filsafat, teori dan praktik)*. Depok: Rajawali Pers. 2018.

### JURNAL

- Asha Feby Nur Permatasari, dkk. “Proses Penyidikan Tindak Pidana Begal Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Polres Banyumas) Investigation Process of Motor Vehicle Robbery Criminial Acts (A Case Study in Banyumas Regional Police),” Universitas Jendral Soedirman, 2020.
- Maulana, Aby, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Perumusan Plea Bargaining System pada Pembaruan Peradilan Pidana Indonesia,” (Jakarta, Universitas Trisakti, 2019), 263.
- Swari, Ayu Diah Pradnya and Ni Nengah Adiyaryani. “Pengaturan terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjsama (justice collaborator) dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji dari Prespektif Sistem Peradilan Pidana,” Universitas

- Udayana, 2018.
- Naufaliz Azzahra, Ardiva. “*Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban*,” Universitas Sebelas Maret, 2022.
- Bilher Hutahaean, “*Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg*,” Fakultas Hukum Universitas Trunajaya Bontang, (2013).
- Claritje Silvia E. Awulle, “*Penyelenggaraan Pendidikan Kristen sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia*,” Jurnal Pendidikan Agama Kristen, Vol. 1, No. 1, 25-37. (2020).
- Edi Pranoto and Nomero Armandheo Simamora, “*Tinjauan Yuridis Penetapan Status Seseorang sebagai Justice Collaborator di Indonesia*,” Iblam Law Review Vol. 3 No. 1, 2023, <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i3.90>.
- Fratama, R. A, “*Jalur Khusus (Plea Bargaining) Dalam Hukum Acara Pidana*,” Badamai Law Journal, 5(2), 230. (2021).
- Harahap, Winda Apriani Zarena, dkk, “*Pengaruh Perubahan Sosial dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*”, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Vol 3, No 1(1), 549–565, (2021).
- Maramis, Junaidy and Nurhikmah Nachrawy, “*Penambahan Pleabargaining dalam Sistem peradilan Pidana di Indonesia*,” Lex Administratum Vol. 10 No. 5, (2022).
- Kukuh, dkk, “*Pemberlakuan Plea Bargaining System Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Untuk Tujuan menyelesaikan Konflik*,” Jurnal Jurisprudence Vol. 10 No. 2, (2020).
- Kisekka, Nakibulle Gladys, “*Plea Bargaining as a Human Rights Question*”, Cogent Social Sciences 6 (1), 2020. <https://doi.org/10.1080/23311886.2020.1818935>.
- Latifah, Marfuatul, “*Pengaturan Jalur Khusus Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (The Eceptional Strip Provisions in the Criminal Procedure Bill)*,” Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 5 (1), 31-45, (2016).
- Nursar Aswad, “*Tinjauan Yuridis Penyiaran Sidang Peradilan Secara Langsung oleh Pers dan Media Menurut Hukum Acara Pidana dan Hukum Media dan Pers serta Penyiaran*,” Universitas Islam Indonesia, 2018, <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/10501/skripsi%20PDF.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Pratama, M. I, “*Pelaksanaan Asas Akusator oleh Polrestabes Bandung dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia*,” Universitas Pasundan. 2022. <http://repository.unpas.ac.id/57292/3/8%20BAB%202.pdf>
- Pura, Margo Hadi, and Hana Faridah, “*Asas Akusator Dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*,” Universitas

Pasundan, 2021, <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.536>.

- Rahmawati, Nur Ainiyah, “*Hukum Pidana Indonesia: Ultimum remedium atau Primum Remedium*”, *Recidive* 2 (1), (2013).
- Ramadhan, C. R, “*Jalur Khusus dan Plea Bargaining: Serupa Tapi Tidak Sama,*” *MaPPI FHUI*, 1–6, (2015).
- Safira, M, “*Law Is a Tool of Social Engineering Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia,*” *Kodifikasia*, 11(1), 118. (2017). Sari, Novita, “*Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika,*” *Jurnal Penelitian Hukum*, (2017).
- Siregar, Nella Octaviany, “*Plea Bargaining dalam Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara,*” *Wajah Hukum* 3 (1), 1-9, (2019).
- Syafril Mallombasang, “*Teori Pidana (Hukuman) dalam Pandangan Hukum,*” *Humanis* Vol. 1, (2015).
- Tirtakoesoemah, Annisa Justisia, and Muhammad Rusli Arafat, “*Penerapan Teori Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran,*” *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* Vol. 18 No. 1, (2019).
- Wahyudhi, Dheny, dkk, “*Prinsip Plea Bargaining dalam Penyelesaian Perkara Pidana Secara Cepat Sederhana dan Biaya Ringan dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana,*” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* Vol. 6 No. 2, (2016).

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana